

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PRAKTIK KARTEL DI INDONESIA (Studi Komparatif: Penerapan *Leniency Program* di Amerika Serikat)

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap praktik kartel di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, termasuk kesulitan pembuktian dan keterbatasan kewenangan otoritas persaingan usaha. Kartel, yang melibatkan konspirasi untuk mempengaruhi harga dan produksi, dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian juga membahas penerapan leniency program yang diterapkan di Amerika Serikat sebagai upaya efektif untuk mengungkap kartel. Program ini memberikan insentif bagi pelaku kartel yang melapor untuk mengungkap jaringan kartel, yang telah terbukti membantu dalam penegakan hukum di negara maju. Di Indonesia, penerapan program serupa belum optimal karena kurangnya regulasi yang mendukung dan budaya hukum yang belum mendukung sepenuhnya. Penelitian ini menyarankan pembaruan UU No. 5 Tahun 1999 untuk memperkuat kewenangan KPPU serta penerapan leniency program guna menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat dan adil.

Kata Kunci: Kartel, Penegakan Hukum, *Leniency Program*

LEGAL ENFORCEMENT AGAINST BUSINESSES THAT CONDUST CARTEL PRACTICES IN INDONESIA (Comparative Study: Implementation of the Leniency Program in the United States)

ABSTRACT

Enforcement against cartel practices in Indonesia faces significant challenges, including evidentiary difficulties and limited powers of competition authorities. Cartels, which involve conspiracies to influence prices and production, are prohibited by Law Number 5 Year 1999. This research uses a normative juridical method with comparative, conceptual, statutory, and case approaches. The data source is secondary data obtained through literature study and analyzed qualitatively. The research also discusses the application of the leniency program implemented in the United States as an effective effort to uncover cartels. This program provides incentives for cartelists who report to uncover cartel networks, which has proven to be helpful in law enforcement in developed countries. In Indonesia, the implementation of a similar program has not been optimal due to the lack of supporting regulations and a legal culture that has not been fully supportive. This study suggests the renewal of Law No. 5/1999 to strengthen the KPPU's authority and the implementation of the leniency program to create a healthier and fairer business competition climate.

Keywords: *Cartel, Law enforcement, Leniency Program*